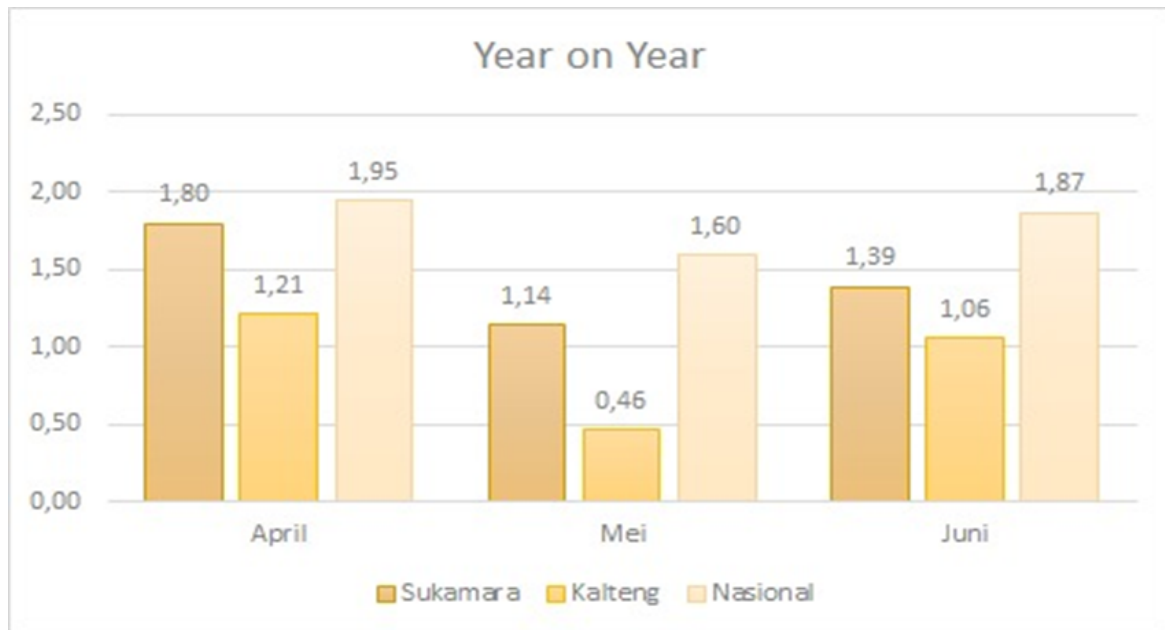
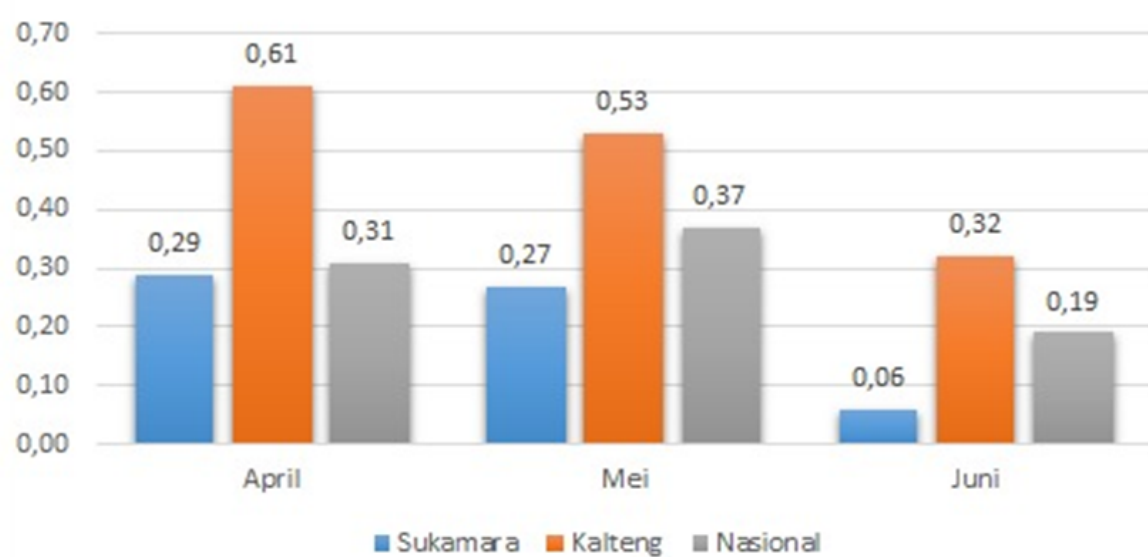


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukamara Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



**Month to Month**



1. Bulan April 2025 inflasi nasional tercatat 1,95% (Y-to-Y), Kalimantan Tengah tercatat sebesar 1,21% (Y-to-Y), sedangkan Kabupaten Sukamara angka inflasi sebesar 0,29% (M-to-M) 1,80% (Y-to-Y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,84. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,76%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,26%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,44%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,83%, kelompok kesehatan sebesar 2,00%, kelompok transportasi sebesar 0,59%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,66 %, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,69% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,30%. Sementara itu terdapat beberapa indeks kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71%. Selain itu, indeks kelompok pengeluaran yang tidak mengalami inflasi maupun deflasi yaitu kelompok Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2025, antara lain cabai rawit, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, emas perhiasan, bawang putih, bawang merah, tarif air minum PAM, cabai merah, sewa rumah, ikan lais, sepeda motor, pasta gigi, Sigaret Putih Mesin (SPM), kue basah, Sigaret Kretek Tangan (SKT), air kemasan, gula pasir, baju muslim anak, mie kering instant, dan minyak goreng

2. Bulan Mei 2025 inflasi nasional tercatat 1,60% (Y-to-Y), Kalimantan Tengah tercatat inflasi sebesar 0,46% (Y-to-Y), sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami deflasi sebesar 0,27 % (M-to-M) inflasi 1,14% (Y-to-Y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,54. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,27%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,26%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,64%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,90%, kelompok kesehatan sebesar 2,00%, kelompok transportasi sebesar 0,42%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,66 %, kelompok penyediaan

makanan dan minuman/restoran sebesar 1,26%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,28%. Sementara itu terdapat beberapa indeks kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,21%. Selain itu, indeks kelompok pengeluaran yang tidak mengalami inflasi maupun deflasi yaitu kelompok pendidikan. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Mei 2025, antara lain Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, emas perhiasan, tarif air minum PAM, sewa rumah, cabai rawit, bawang putih, ikan lais, cabai merah, sepeda motor, Sigaret Putih Mesin (SPM), pasta gigi, ketimun, bawang merah, Sigaret Kretek Tangan (SKT), air kemasan, baju muslim anak, minyak goreng, mie kering instant, dan gula pasir.

3. Bulan Juni 2025 inflasi nasional tercatat 1,81% (Y-to-Y), Kalimantan Tengah tercatat sebesar 1,81 (Y-to-Y), sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 0,32% (M-to-M) 1,39% (Y-to-Y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,50. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,44%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,09%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,54 %, kelompok kesehatan sebesar 1,40 %, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,10%, kelompok pendidikan sebesar 2,18%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,52 %, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,16%. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks harga adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%, kelompok transportasi sebesar 0,67%, dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12 %. Pada Juni 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi *y-on-y*, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,17%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02%, kelompok kesehatan sebesar 0,03%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02%, kelompok pendidikan sebesar 0,07%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,27%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,46%. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,06%, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *y-on-y* pada Juni 2025, antara lain emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, ikan gabus, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, mie kering instant, ikan bakar, udang basah, sewa rumah, pemeliharaan/service, nasi dengan lauk, terong, kangkung, bakso siap santap, pelumas/oli mesin, kelapa, sepeda motor, Sigaret Kretek Tangan (SKT). Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi *y-on-y*, antara lain: daging ayam ras, ikan nila, angkutan udara, beras, bensin, tomat, ikan papuyu, bahan bakar rumah tangga, ikan saluang, susu bubuk untuk balita, rampela hati ayam, solar, ikan patin, ikan kapar, kol putih/kubis, sabun cair/cuci piring, daun bawang, ikan peda, bayam, dan seng.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari 20 komoditas makanan dan non makanan dengan bobot terbesar dalam diagram timbang SBH di Kabupaten Sukamara tahun 2022, terdapat beberapa komoditas yang sering bergejolak yaitu Emas Perhiasan, Cabai Rawit, Beras, Bawang Merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Daging Ayam ras. Memperhatikan komoditas yang sering mengalami peningkatan signifikan tersebut, TPID Kabupaten Sukamara melalui dinas teknis melakukan verifikasi lapangan terhadap penyebab utama meningkatnya harga komoditas tersebut dengan melakukan survey terhadap pedagang langsung, pelaku usaha peternakan atau pertanian, pasokan bahan baku dan pengiriman.

Dari hasil evaluasi TPID Kabupaten Sukamara faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut :

#### 1. Tingginya Harga Kebutuhan Pokok

Tingginya harga kebutuhan pokok yang terjadi diakibatkan oleh adanya kenaikan bahan baku.

#### 2. Ketergantungan ketersediaan pasokan dari daerah lain

Kabupaten Sukamara terletak diantara Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau serta berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar pasokan diperoleh dari Pangkalan Bun ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulau Jawa. Pasokan yang kita dapat dari Pangkalan Bun juga merupakan pasokan yang di peroleh dari Pulau Jawa. Panjangnya rantai distribusi membuat peningkatan harga jadi berkali - kali baik secara pedagang maupun karena angkutan. Masyarakat Kabupaten Sukamara sudah ada pemasok kebutuhan komoditas pangan namun masih dalam jumlah terbatas, dengan bahan penunjang yang masih diperoleh dari daerah lain juga.

#### 3. Berkurangnya pasokan komoditas

Masih besarnya ketergantungan bahan penunjang dari daerah lain membuat hasil pertanian atau peternakan menjadi pasang surut, terutama yang masih sangat bergantung dengan musim/alam sehingga stabilitas harga menjadi lebih sulit terkontrol. Cuaca ekstrim berupa hujan dan angin ribut yang sudah berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia juga menjadi salah satu factor menurunnya pasokan.

#### 4. Biaya transportasi angkutan yang tinggi

Kenaikan BBM menjadi penyumbang terbesar inflasi di Indonesia yang menyebabkan biaya transportasi naik sehingga untuk sampainya komoditas pangan dari sentra produksi ke konsumen yang melewati arus transportasi yang tidak pendek memerlukan biaya yang tinggi. Pengaruh faktor distribusi tersebut sangat mempengaruhi juga terhadap komoditas, pengaruh iklim/cuaca pun dapat menyebabkan distribusi bisa terganggu, infrastruktur yang belum memadai juga bisa menyebabkan biaya transportasi semakin tinggi. Meskipun sekarang sudah ada kebijakan pemerintah pusat untuk mulai menstabilkan BBM namun tidak di ikuti dengan penurunan biaya transportasi di daerah.

#### 5. Peningkatan Permintaan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat menjelang Bulan Puasa atau Ramadhan bagi umat muslim permintaan bahan pokok akan meningkat dan akan mempengaruhi harga pasar yang menyebabkan IHK mengalami kenaikan.

## 6. Kebijakan Pemerintah

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat menjadi faktor penting penyumbang terbesar inflasi yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan pada akhir tahun 2022 melalui Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pemanfaatan dana Biaya Tak Terduga untuk menanggulangi tingginya tingkat inflasi atas kebijakan yang sudah ditetapkan. Kebijakan yang sangat berpengaruh tersebut diantaranya adalah :

1. Diskon tarif listrik
2. Kebijakan menaikkan BBM
3. Kebijakan peningkatan prosentase perhitungan PPN
4. Tarif cukai rokok yang naik secara bertahap

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sukamara, TPID melalui dinas teknis selain melakukan pemantauan harga komoditas penyumbang inflasi juga melakukan beberapa langkah strategis sebagai upaya pengendalian. Dengan menyusun program kerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara dan Dana Insentif Fiskal, TPID Kabupaten Sukamara melakukan beberapa kegiatan sebagai pelaksanaan kebijakan dalam hal penanganan inflasi daerah di Kabupaten Sukamara. kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengikuti Rakornas Mingguan Pengendalian Inflasi Secara Online yang dilaksanakan setiap minggu.
2. Melaksanakan rapat teknis TPID untuk menyusun rencana program kegiatan dan pelaksanaan pengendalian inflasi pada saat terjadi lonjakan harga.
3. Melaksanakan Sidak Pasar secara berkala untuk memantau harga komoditas pada saat terjadi lonjakan harga yang signifikan atau memantau stok persediaan komoditas pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional.
4. Program KURDA Sukma

Dalam upaya memperkuat permodalan pelaku UMKM, Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan bantuan berupa subsidi suku bunga bagi para pedagang UMKM sejak tahun 2023. Bekerjasama dengan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) yang merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sukamara penyaluran kredit KURDA SUKMA diharapkan mampu memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM. Dengan suku bunga 12% pertahun, Pemerintah Kabupaten Sukamara mensubsidi sebesar 9% sehingga suku bunga yang di bebaskan ke nasabah UMKM hanya sebesar 3%. Tahun 2025, hingga saat ini PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sudah menyalurkan kredit sebesar Rp. 5.400.000.000 dengan baki debit sebesar Rp. 2.178.815.000 dan biaya yang sudah di anggarkan untuk subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 350.000.000 kepada 171 nasabah UMKM (111 debitur exsisting dan 60 debitur lunas).

## 5. Gerakan Peternak Sadar Inflasi

Daging ayam ras merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi paling dominan, terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan atau event besar nasional dan kabupaten. Adanya pengurangan jatah bibit ayam ras untuk perusahaan – perusahaan yang jadi pemasok peternakan di Kabupaten Sukamara membuat harga daging ayam ras menjadi melonjak tajam.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui TPID melakukan rapat koordinasi secara intens dengan pelaku peternakan dan pedagang ayam ras dalam mengatur pola panen di kandang untuk menjaga kestabilan ketersediaan ayam ras, meminta penjualan daging ayam ras mengutamakan pemenuhan kebutuhan pasokan di pasar – pasar di Kabupaten Sukamara, dan mengedukasi pelaku usaha peternakan ayam ras untuk peduli dengan inflasi yang akan berpengaruh secara massif untuk kegiatan usaha lainnya.

Kegiatan ini berpengaruh signifikan terhadap harga jual daging ayam ras di pasar, terbukti harga ayam ras bisa stabil meskipun menjelang hari besar keagamaan atau event besar. Harga daging ayam ras berkisar Rp. 30.000 – Rp. 40.000/kg yang awalnya bisa mencapai harga Rp. 45.000 – Rp. 50.000/kg.

#### 6. Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL)

Kegiatan promosi penganeekaragaman pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat, pada kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) ini dilakukan juga pembibitan komoditas hortikultura seperti cabe, terong, tomat untuk dibagikan kepada Organisasi perangkat daerah untuk ditanam di pekarangan kantor. Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) ini juga di promosikan pada kegiatan Car Free Day dengan membagikan bibit tersebut untuk ditanam dipekarangan rumah. Kegiatan ini bertujuan :

1. Pemanfaatan lahan perkantoran untuk penyediaan pangan dan gizi.
2. Sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.
3. Sebagai upaya promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat.
4. Pasar Penyeimbang Melalui Kios Pangan Sukma

Salah satu upaya untuk menstabilkan harga pangan strategis Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bekerjasama dengan Bulog membuka Kios Pangan Sukma. Kios Pangan Sukma menjual komoditas utama seperti beras, gula, minyak, telur, bawang merah dan bawang putih dengan harga lebih terjangkau dari pasar.

#### 8. Preman Laskar (PRogram pEMANfaatan LAhan bekaS Kebakaran dan terlantaR)

Sebagai langkah konkrit mengatasi kelangkaan beras dan pelaksanaan Program Pemanfaatan Lahan Bekas Kebakaran dan Terlantar (Preman Laskar) yang merupakan Program Kerja TPID Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Sukamara menggalakkan masyarakat untuk menanam padi seluas 611 Ha di Desa Sungai Pasir dan Desa Pulau Nibung yang sudah di panen keseluruhan dan bisa memproduksi beras sekitar 1.781 ton. Dan untuk menjaga keberlanjutan maka Pemerintah Kabupaten Sukamara membagikan kembali bantuan benih bibit padi kepada Gapoktan di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci. Dengan tetap menjaga keberlanjutan program ini diharapkan Kabupaten Sukamara bisa menjadi daerah yang mandiri pangan.

Dalam jangka menengah/panjang program memanfaatkan lahan terlantar dan bekas kebakaran sebagai penyangga pangan bisa menjadi penghasil komoditi yang bisa memenuhi kebutuhan di Kabupaten Sukamara dan wilayah di sekitarnya sehingga dapat berperan dalam pengendalian inflasi.

Sasaran jangka panjang yang diinginkan sebagai berikut :

- Menghilangkan ketergantungan pemenuhan komoditas pangan terhadap daerah lain
  - Menstabilkan harga komoditas pangan
  - Menciptakan lapangan kerja
  - Menciptakan petani milenial yang produktif dan inovatif
9. Kegiatan Pasar Murah

Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perdagangan melaksanakan Kegiatan Pasar Murah sebagai bentuk intervensi terhadap lonjakan harga bahan pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kegiatan tersebut menyediakan kebutuhan pokok seperti Beras Premium 5 Kg, Minyak Goreng 1 Liter, Gula 1 Kg, Sirup 1 botol, Garam 2 bungkus dengan harga yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Melalui Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/130/2025 Tentang Komoditi, Alokasi Besaran Subsidi dan Harga Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat Pada Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara Tahun 2025, maka nilai Subsidi yang diberikan pada paket bahan pokok untuk pasar murah sebesar 51,72% atau dari harga paket bahan pokok Rp. 145.000,- dijual dengan harga subsidi menjadi Rp. 70.000,-. Dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 250.000.000,- maka jumlah paket bahan pokok pasar murah yang dapat dijual adalah sebanyak 3.333 Paket bahan pokok pasar murah. Kegiatan pasar murah di Kabupaten Sukamara dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan se Kabupaten Sukamara.

#### 10. Pembagian Bantuan Sosial Tunai

Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Mendawai, Kelurahan Padang dan Kelurahan Jelai dari tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 16 Juli 2025, dengan realisasi sebesar 91,48% atau sebanyak 1.557 KPM dengan rincian sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	TOTAL KPM	SALUR	TIDAK SALUR	JUMLAH	PROSENTASE	SALDO
1.	Kelurahan Padang	543	446	97	Rp. 340.967.000	82,14%	Rp. 74.156.500
2.	Kelurahan Mendawai	586	538	48	Rp. 411.301.000	91,80%	Rp. 36.696.000
3.	Kelurahan Jelai	573	573	0	Rp. 438.058.500	100%	Rp. 0
<b>TOTAL</b>		1.702	1.557	145	Rp. 1.190.326.500	91,48%	Rp. 110.852.500

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.



Dengan terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah kabupaten Sukamara telah menyusun program kerja dan mempersiapkan rancangan pelaksanaan kegiatan dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sukamara. Selain mengikuti rapat via zoom meeting yang dilaksanakan tiap minggu dengan Kementerian Dalam Negeri, TPID Kabupaten Sukamara juga secara rutin mengadakan rapat internal dan pelaporan harga komoditas pangan. Namun ada beberapa hal yang harus lebih dimaksimalkan lagi dalam upaya memitigasi masalah penanganan inflasi di Kabupaten sukamara, antara lain :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan TPID Kabupaten Sukamara dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Sukamara.
  2. Upaya Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam memenuhi kebutuhan komoditas pangan secara mandiri sudah mulai teratasi sedikit demi sedikit, diharapkan program dan kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan sehingga Kabupaten Sukamara bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.
  3. Perlu adanya peta jalan (Roadmap) pengendalian inflasi agar pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi bisa berjalan terarah dan terukur. Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di OPD pun bisa sesuai dengan tata kelola serta mendapatkan hasil yang maksimal serta tepat sasaran.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan dalam menyikapi kenaikan harga komoditas pangan sekaligus rekomendasi pengendalian inflasi di Kabupaten Sukamara secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Keterjangkauan Harga

1. Mengintensifkan pelaksanaan program Operasi Pasar Murah (OPM) Bersubsidi dengan Skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
2. Penguatan peran BUMD dalam pengendalian inflasi terutama untuk komoditas pangan.
3. Melakukan upaya normalisasi harga beras melalui program SPHP secara masif bersama Perum Bulog, serta mendorong realisasi penyaluran bantuan pangan 2025

b. Ketersediaan Pasokan

1. Merutinkan Sidak Pasar, Operasi Pasar, dan Pemantauan ke Pasar maupun Gudang Distributor sebagai upaya normalisasi harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan pasokan.
2. Melakukan upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi melalui penggunaan varietas unggul, pengembangan bibit mandiri, percepatan tanam pada daerah irigasi, maupun optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan pada komoditas beras.
3. Melakukan antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang HBKN Idul Adha melalui penyimpanan atau pencadangan komoditas terutama hortikultura.
4. Memaksimalkan program integrasi pertanian dan peternakan terpadu secara berkesinambungan untuk meningkatkan produksi pangan
5. Penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri seperti beras, cabe, sayur – sayuran, daging ayam ras dan telur dengan memanfaatkan lahan terlantar dan eks terbakar untuk tanaman cepat panen.

Memaksimalkan program preman laskar dengan pendampingan intensif dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar hasil panen tidak hanya memenuhi ketersediaan pasokan tapi juga keterjangkauan harga.

7. Memaksimalkan Kios Pangan Sukma (Kopas) yang bekerjasama dengan Bolug.

c. Kelancaran Distribusi

1. Melaksanakan program subsidi ongkos angkut dengan anggaran pemerintah
2. Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan akses (jalan dan jembatan) antar Kabupaten maupun antar dalam daerah.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan peran distributor dan subdistributor.

d. Komunikasi Yang Efektif

1. Informasi harga terkini di pasar melalui billboard yang dipasang di lokasi strategis di area pasar sehingga dapat menekan ekspektasi harga masyarakat.
2. Optimalisasi publikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai sumber informasi harga komoditas pangan strategis.